

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan alat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan rangkaian proses kegiatan yang dilakukan berupa proses pengumpulan dan pengolahan data, analisis hingga pengambilan kesimpulan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan pokok pembahasan. Adapun rangkaian kegiatan yang digunakan sebagai upaya pendekatan dalam studi yang berjudul “Evaluasi Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi Hasil Pemekaran Wilayah” ini adalah sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan mengkaji secara teliti dan teratur menurut kaidah tertentu. Dalam studi ini dikaji evaluasi tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi dengan mempergunakan pendekatan dari indikator-indikator yang termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif evaluatif yaitu metode penelitian untuk menggambarkan keadaan karakteristik wilayah Kota Batu yang selanjutnya dievaluasi sesuai indikator yang termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

#### 3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam studi ini ditentukan berdasarkan pendekatan dari indikator evaluasi yang mencakup syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan yang termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Adapun variabel yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi hasil pemekaran adalah:

**Tabel 3. 1**  
**Variabel Penelitian**

<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>SUB VARIABEL</b>	<b>METODE PENGUKURAN BERDASARKAN PP NO. 78 Tahun 2007</b>
1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kota Batu berdasarkan komponen evaluasi PP No.78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Indonesia.
		Kepadatan Penduduk	Jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah efektif
	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas PerKapita	PDRB non migas atas dasar harga berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk
		Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah PDRB non migas atas dasar harga konstan (ADHK) tahun ke-t dikurangi PDRB non migas ADHK tahun ke t-1 dibagi dengan jumlah PDRB non migas ADHK tahun ke t-1 dikalikan 100
2. Menganalisis dan mengevaluasi tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi dibandingkan dengan kabupaten induknya dengan menggunakan basis indikator yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah..	Potensi Daerah	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	Jumlah lembaga keuangan (bank maupun nn bank) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000
		Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	Jumlah pertokoan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000
		Rasio pasar per 10.000 penduduk.	Jumlah pasar dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000
		Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	Jumlah sekolah SD/ sederajat dibagi dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun
		Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	Jumlah sekolah SLTP/ sederajat dibagi dengan penduduk usia sekolah 13-15 tahun
		Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	Jumlah sekolah SLTA/ sederajat dibagi dengan penduduk usia sekolah 16-18 tahun
		Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	Jumlah fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000
		Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	Jumlah tenaga medis dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000
		Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.	Jumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100
		Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100
3. Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan Kota		Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor

TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	METODE PENGUKURAN BERDASARKAN PP NO. 78 Tahun 2007
Batu sebagai daerah otonomi berdasarkan hasil evaluasi tingkat kemampuan PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah..		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	Jumlah tenaga kerja berpendidikan SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas dikali 100
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	Jumlah tenaga kerja berpendidikan S-1 dibagi dengan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dikali 100
		Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Gol I/II/III/IV dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000
	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS	Jumlah pendapatan daerah sendiri yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil SDA dan penerimaan dari bagi hasil provinsi.
		Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	Jumlah pendapatan daerah sendiri (PDS) dibagi dengan jumlah penduduk.
		Rasio PDS terhadap PDRB Non Migas	Jumlah PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas
	Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	Jumlah sarana peribadatan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000
		Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.	Jumlah fasilitas olahraga (lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000.
		Jumlah balai pertemuan	Jumlah balai pertemuan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000
Sosial Politik	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih	Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislative dibagi dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dikali dengan 100.	
	Jumlah organisasi kemasyarakatan.	Jumlah organisasi kemasyarakatan terdaftar	
Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan	Jumlah luas wilayah daratan ditambah dengan luas wilayah lautan	
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	Jumlah luas wilayah yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya	
Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	Jumlah aparat pertahanan (TNI/ABRI) dibagi dengan luas wilayah	
	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.	Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	
Keamanan	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	Jumlah aparat keamanan (Polisi) dibagi dengan jumlah penduduk	

TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	METODE PENGUKURAN BERDASARKAN PP NO. 78 Tahun 2007
	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Sepertiga dari indeks pengetahuan, indeks harapan hidup dan indeks daya beli.
	Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota). Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	Jumlah keseluruhan jarak kecamatan menuju pusat pemerintahan dibagi dengan jumlah kecamatan. Jumlah keseluruhan waktu tempuh menuju pusat pemerintahan dibagi dengan jumlah kecamatan.
	Fiaik kewilayahan	Jumlah wilayah administrasi	Jumlah keseluruhan wilayah administrasi, minimal terdiri dari 4 kecamatan untuk tingkat kabupaten/kota.



### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam studi ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Survey sekunder yaitu pengumpulan data-data sekunder berdasarkan studi literatur dan instansi.
2. Survey primer berdasarkan observasi yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil pengamatan. Hasil yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan basis indikator yang termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

#### **3.3.1 Karakteristik Wilayah Kota Batu**

Metode pengumpulan data untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah Kota Batu hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari instansi terkait dengan objek penelitian seperti Kantor Pemerintah Kota Batu dan Dinas-dinas Pemerintah Kota Batu. Pokok bahasan karakteristik wilayah disesuaikan dengan data-data yang mendukung indikator evaluasi daerah otonomi hasil pemekaran wilayah yang termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

#### **3.3.2 Evaluasi Tingkat Kemampuan Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi**

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk studi ini adalah survey sekunder dari hasil pembahasan karakteristik wilayah Kota Batu. Data-data sekunder hasil pembahasan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah dan selanjutnya ditentukan tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi berdasarkan hasil perkalian bobot dan skor yang diperoleh dari hasil evaluasi.

#### **3.3.3 Rekomendasi Peningkatan Kemampuan Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi**

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menyusun rekomendasi peningkatan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi adalah survey primer dengan menggunakan pendekatan observasi/pengamatan dari hasil evaluasi tingkat kemampuan Kota Batu dan survey sekunder dengan menggunakan hasil pembahasan karakteristik wilayah Kota Batu.

**Tabel 3. 2**  
**Metode Pengumpulan Data**

TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	METODE PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	
Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kota Batu berdasarkan komponen evaluasi PP No.78 Tahun 2007.	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Survey sekunder dengan studi instansi	BPS Kota Batu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu	
		Kepadatan Penduduk			
	Kemampuan ekonomi	PDRB Non Migas PerKapita			
		Pertumbuhan Ekonomi			
		Kontribusi PDRB Non Migas			
	Potensi daerah	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.			
		Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk			
		Rasio pasar per 10.000 penduduk.			
		Rasio sekolah SD per penduduk usia SD			BPS Kota Batu, Dinas Pendidikan Kota Batu
		Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP			
		Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.			
		Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.			BPS Kota Batu, Dinas Kesehatan Kota Batu
		Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk			
		Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.			BPS Kota Batu
		Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga			
		Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor			BPS Kota Batu, Dinas PU, dan Mapolres Kota Batu
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas			
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas			
	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk				
Kemampuan keuangan	Jumlah PDS	BPS Kota Batu dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu			
	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk				
	Rasio PDS terhadap PDRB Non Migas				
Sosial budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	BPS Kota Batu dan Bappeda Kota Batu,			
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.				
	Jumlah balai pertemuan				

TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	METODE PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
	Sosial politik	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih Jumlah organisasi kemasyarakatan.		
	Luas daerah	Luas wilayah keseluruhan Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan		
	Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.		
	Keamanan	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk		
	Tingkat kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia		
	Rentang kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota). Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).		Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan
	Fisik Kewilayahan	Jumlah wilayah administrasi	Survey sekunder dengan studi instansi	BPS Kota Batu dan Bappeda Kota Batu
Menganalisis dan mengevaluasi tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi dibandingkan dengan kabupaten induknya dengan menggunakan basis indikator yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007.	Karakteristik wilayah berdasarkan komponen evaluasi PP No. 78 Tahun 2007.	Kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali dan fisik kewilayahan.	Survey Sekunder	Hasil pembahasan karakteristik wilayah.
Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi berdasarkan hasil evaluasi tingkat kemampuan PP No. 78 Tahun 2007.	Hasil pembahasan karakteristik wilayah Kota Batu dan hasil evaluasi tingkat kemampuan daerah otonomi	-	Survey Primer dengan observasi dan Survey Sekunder dengan studi instansi	Hasil pembahasan karakteristik wilayah dan hasil pembahasan evaluasi kemampuan daerah otonomi

### **3.4 Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis melalui suatu metode yang pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan digunakan sebagai pendekatan tindakan selanjutnya.

#### **3.4.1 Karakteristik Wilayah Kota Batu**

Metode analisis yang digunakan untuk kajian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada kondisi eksisting wilayah studi dan didasarkan pada penguraian sebab akibatnya, dimana analisis ini tidak digunakan metode matematis namun berdasarkan atas teori-teori yang mendasar dari berbagai sumber. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan maupun karakteristik yang ada pada Kota Batu berdasarkan pendekatan komponen evaluasi PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

#### **3.4.2 Evaluasi Tingkat Kemampuan Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif evaluatif dengan pendekatan metode statistik deskriptif yaitu teknik menganalisis data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, model perhitungan, maupun presentase. Untuk hasil analisis syarat fisik kewilayahan Kota Batu dievaluasi kesesuaiannya dengan pendekatan persyaratan fisik kewilayahan yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 pasal 8 yaitu untuk membentuk kabupaten/kota baru minimal terdiri dari 4 kecamatan.

Sedangkan hasil analisis untuk syarat teknis Kota Batu kemudian dibandingkan dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Malang melalui pembobotan atau skoring pada masing-masing indikator yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007.

Pemberian skor pada masing-masing indikator telah ditentukan dalam PP No. 78 Tahun 2007 yaitu pemberian skor berdasarkan besaran/nilai rata-rata pembanding. Setiap indikator mempunyai skor skala 1-5 yaitu:

- a. Skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata pembanding.
- b. Skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata pembanding.
- c. Skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata pembanding.

- d. Skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata pembandingan.
- e. Skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata pembandingan.

Dari hasil perhitungan maka dilakukan penjumlahan bobot pada masing-masing indikator. Nilai tersebut dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat mampu, mampu, kurang mampu, tidak mampu, sangat tidak mampu.

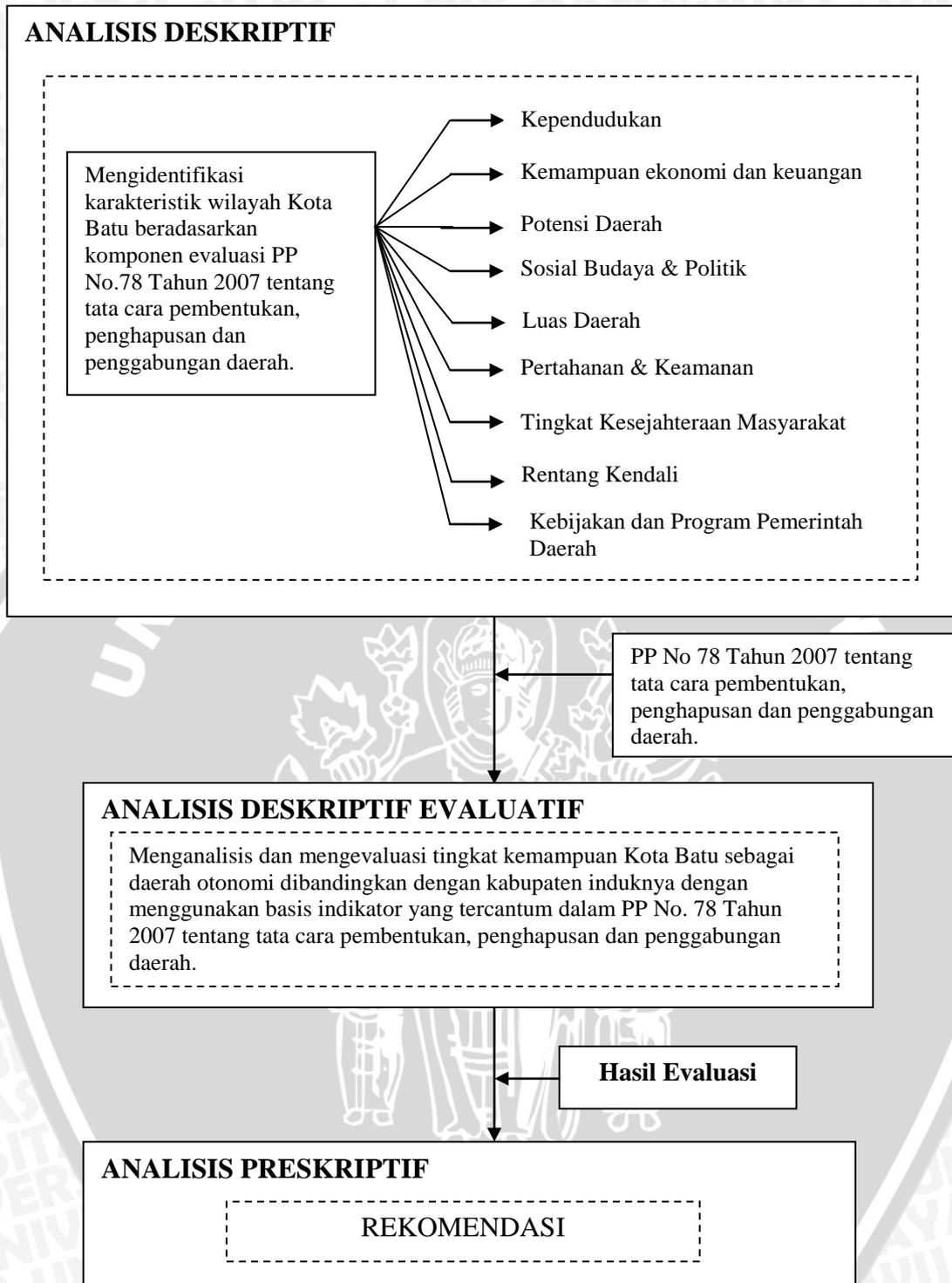
**Tabel 3.3**  
**Kategori Kelulusan**

KATEGORI	TOTAL NILAI KESELURUHAN INDIKATOR
Sangat Mampu	420 s/d 500
Mampu	340 s/d 419
Kurang Mampu	260 s/d 339
Tidak Mampu	180 s/d 259
Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179

Dari hasil kategori tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi.

### **3.4.3 Rekomendasi Peningkatan Kemampuan Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi**

Metode analisis yang digunakan untuk menyusun rekomendasi peningkatan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif dalam penelitian ini merupakan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kabupaten induk dengan menggunakan basis indikator yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta dengan pertimbangan kondisi karakteristik wilayah Kota Batu.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

**Tabel 3. 4**  
**Desain Survey Evaluasi Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi Hasil Pemekaran**

TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	METODE PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	METODE ANALISIS DATA	OUTPUT	
Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kota Batu berdasarkan komponen evaluasi PP No.78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah..	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Survey sekunder dengan studi instansi	BPS Kota Batu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu	Metode Deskriptif	Karakteristik wilayah Kota Batu yaitu kondisi kependudukan, luas wilayah, kemampuan ekonomi dan keuangan, potensi daerah sosial budaya dan politik, pertahanan dan keamanan, rentang kendali dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batu.	
		Kepadatan Penduduk					
	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas PerKapita	Survey sekunder dengan studi instansi	BPS Kota Batu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu	Metode Deskriptif		
		Pertumbuhan Ekonomi					
	Potensi Daerah		Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	Survey sekunder dengan studi instansi	BPS Kota Batu		Metode Deskriptif
			Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk				
			Rasio pasar per 10.000 penduduk.				
			Rasio sekolah SD per penduduk usia SD				
			Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP				
			Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.				
Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.							
Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk							
Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.	BPS Kota Batu, Dinas Pendidikan Kota Batu						
Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	BPS Kota Batu, Dinas Kesehatan Kota Batu						
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	BPS Kota Batu						
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA	BPS Kota Batu, Dinas PU, dan Mapolres Kota Batu						
			BPS Kota Batu				

TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	METODE PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	METODE ANALISIS DATA	OUTPUT
		terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas				
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas				
		Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk				
Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS		Survey sekunder dengan studi instansi	BPS Kota Batu dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu	Metode Deskriptif	
	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk					
	Rasio PDS terhadap PDRB Non Migas					
Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk		Survey sekunder dengan studi instansi	BPS Kota Batu dan Bappeda Kota Batu,	Metode Deskriptif	
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.					
	Jumlah balai pertemuan					
Sosial Politik	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih		Survey sekunder dengan studi instansi			
	Jumlah organisasi kemasyarakatan.					
Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan		Survey sekunder dengan studi instansi			
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan					
Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah		Survey sekunder dengan studi instansi			
	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.					
Keamanan	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk		Survey sekunder dengan studi instansi			
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia		Survey sekunder dengan studi instansi			
Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan		Survey sekunder dengan studi instansi	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan	Metode Deskriptif	

TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	METODE PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	METODE ANALISIS DATA	OUTPUT
		(provinsi atau kabupaten/kota).				
		Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).				
	Fisik Kewilayahan	Jumlah wilayah administrasi	Survey sekunder dengan studi instansi	BPS Kota Batu dan Bappeda Kota Batu	Metode Deskriptif	
Menganalisis dan mengevaluasi tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi dibandingkan dengan kabupaten induknya dengan menggunakan basis indikator yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah..	Karakteristik wilayah berdasarkan komponen evaluasi PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah..	Kependudukan, Kemampuan ekonomi, potensi daerah, Kemampuan keuangan, Sosial budaya, Sosial Politik, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Rentang Kendali dan Fisik Kewilayahan.	Survey Sekunder	Hasil pembahasan karakteristik wilayah.	Metode Statistik Deskriptif	Tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi.
Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi berdasarkan hasil evaluasi tingkat kemampuan PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	Karakteristik wilayah Kota Batu dan hasil evaluasi tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi	-	Survey primer dengan observasi dan survey sekunder dengan studi instansi	Hasil pembahasan evaluasi kemampuan daerah otonomi	Metode Evaluatif	Rekomendasi peningkatan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi.



